



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Krisis Ekonomi Global Berdampak pada Ekonomi Indonesia

TINDAKAN CEPAT PEMERINTAH:



Stabilisasi ekonomi makro yang lebih kondusif, Melalui kebijakan fiskal dan moneter (termasuk pengendalian inflasi)



Menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan



Pengendalian harga komoditi pokok seperti pangan dan BBM



Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit



Mendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit.



Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan proyek padat karya serta menambah alokasi Rastra (beras sejahtera).

#SolusiJokowi

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI



TUJUAN:

- Menggerakkan kembali sektor riil Indonesia.
- Meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global.
- Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah.
- Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan
- Menggairahkan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% yang didapat dari konversi minyak solar ke LPG.

3 LANGKAH PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO:

1 Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

- Ada 98 peraturan yang dirombak untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri nasional.
- Deregulasi mulai September dan Oktober 2015.

2 Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan: penyederhanaan perijinan, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum, serta mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional.

3 Meningkatkan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, disamping membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti



Komitmen pemerintah untuk melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi.



Presiden, Wakil Presiden dan Menteri memimpin langsung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini.

#SolusiJokowi



LANGKAH Jokowi ATASI

KELESUAN EKONOMI

PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI

3 LANGKAH JOKOWI MENGATASI EKONOMI DUNIA YANG LAGI LESU DAN BERDAMPAK PADA INDONESIA

1. Stabilisasi ekonomi makro melalui langkah kebijakan fiskal dan moneter berkoordinasi bersama BI dan OJK.
2. Menggerakkan ekonomi riil dengan langkah deregulasi, debirokratisasi, menggerakkan sektor riil.
3. Melindungi ekonomi lemah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.



4 LANGKAH DAN TUJUAN MENGGERAKKAN EKONOMI RIIL

1. Meningkatkan daya saing industri nasional dengan efisiensi pengadaan bahan baku, mengurangi beban industri nasional serta membuat ekspor lebih lancar.
2. Menjamin kepastian usaha dan pengembangan investasi dengan melakukan deregulasi sistem pengupahan dana ketenagakerjaan, pengadaan lahan, mempermudah investasi di sektor kelistrikan, debirokratisasi
3. Kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui kebijakan bebas visa
4. Deregulasi sektor energi dengan pembangunan kilang, kelancaran pasokan serta diversifikasi ke gas.



Upaya relaksasi bagi industri nasional diikuti langkah penyelesaian hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional dengan simplikasi perizinan, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan serta perlindungan hukum atas diskresi. Kepala daerah diberi peran untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

PENJELASAN PAKET

KEBIJAKAN EKONOMI

PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI

MENGEMBANGKAN EKONOMI MAKRO YANG KONDUSIF

- a. Stabilisasi fiskal dan moneter
- b. Percepatan belanja
- c. Penguatan neraca pembayaran



MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL

- a. Mendorong daya saing industri nasional (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal untuk menggerakkan sektor riil)
- b. Mempercepat proyek strategis nasional
- c. Meningkatkan investasi properti



MELINDUNGI MASYARAKAT

- a. Stabilisasi harga pangan
- b. Percepatan pencairan dana desa
- c. Penambahan raskin



BAGAIMANA CARANYA MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL

PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI

Mendorong daya saing industri nasional (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal untuk menggerakkan sektor riil)

Mempercepat proyek strategis nasional

Meningkatkan investasi properti

INI PENJELASANNYA

DEREGULASI

Tujuan Deregulasi

- ➔ Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, beban regulasi dan birokrasi dihilangkan
- ➔ Menghilangkan gap daya saing industri (sistem pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik angkutan, trade financing, logistic center)
- ➔ Industri nasional bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.:

BENTUK DEREGULASI

- Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi
 - Menyelarasakan peraturan
 - Melakukan konsistensi peraturan

Sebanyak 98 peraturan akan direvisi, diterbitkan (17 RPP, 11 Rancangan Perpres, 2 Rancangan Inpres, 63 Rancangan Permen, 5 aturan lainnya).

Aturan yang akan direvisi maupun diterbitkan misalnya: fasilitas investasi, penyederhanaan izin impor bahan baku (gula, garam, hortikultura, kertas kemasan), pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, mengurangi hambatan distribusi antar pulau

DEBIROKRATISASI

- Menyederhanakan dan memudahkan perizinan
- Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Pelayanan perizinan melalui sistem elektronik

PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN USAHA

- Penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi
- Pemberantasan pungutan liar
- Sanksi yang tegas dan tuntas

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Terhambatnya proyek strategis nasional disebabkan oleh perizinan dari lembaga terkait, tata ruang dan penyediaan tanah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penjaminan kebijakan pemerintah, ketakutan pejabat pemerintah

REGULASI YANG DIPERLUKAN

- Peraturan Presiden baik baru maupun pengaturan ulang untuk mempertegas
- Instruksi Presiden untuk memberi pengarahannya pada kepala daerah agar mendukung percepatan proyek strategis nasional.

MENDORONG INVESTASI PROPERTI

KEBIJAKAN MENGATASI PELEMAHAN DI SEKTOR PROPERTI

- Membuka kepemilikan orang asing terhadap rumah susun mewah dengan harga Rp 10 Miliar ke atas
- Perubahan PP untuk memperkuat Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Penyelesaian PP Hunia Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah



SEKTOR INDUSTRI



PERMASALAHAN

- Gejolak ekonomi global dan kawasan sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998 berlanjut dengan krisis keuangan global tahun 2008 berpengaruh pada kelesuan ekonomi dunia yang sampai sekarang belum begitu pulih.
- Ketidaksiplinan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan
- Keterlambatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas
- Ketidakhati-hatian kita dalam memilih mitra modal dan teknologi
- Faktor di atas membuat industri nasional tidak berkembang dan cenderung terus menurun perannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
- Ketergantungan industri kita terhadap impor baik karena ketertinggalan dalam infrastruktur, listrik, dan ketidakjelasan status ketersediaan lahan maupun belum terbangunnya konektivitas yang menghubungkan sumber-sumber daya secara efisien, membuat industri nasional tidak optimal dalam memproduksi barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan barang-barang world class di pasar ekspor.

- Memulihkan industri agar tidak menimbulkan PHK yang banyak, meningkatkan daya saing industri yang sejajar dengan industri yang efisien di negara-negara lain, sehingga menjadi daya tarik investasi, dan memberikan berbagai inisiatif baru untuk membangun keunggulan industri nasional.
- Deregulasi dilakukan untuk membangkitkan kinerja industri dengan menghilangkan berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi beban waktu dan biaya produksi, menjadi kendala bagi masuknya investasi masyarakat, menjadi penghambat kelancaran perdagangan, dan menjadi mahalnya penyerapan bahan baku terutama dari hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan kita sendiri.
- Peraturan-peraturan mengenai sistem pengupahan, penurunan harga gas, pengelolaan sumber daya air, insentif bagi pelayanan jasa angkutan dan pelabuhan akan menambah daya saing industri
- Peraturan yang mendukung pengembangan kawasan industri yang atraktif, pusat logistik berikat yang menyediakan barang-barang kebutuhan industri dan penyangga ekspor serta fasilitas yang mendukung pengembangan industri substitusi impor barang-barang FTA, tentu menjadi tambahan keunggulan bagi industri.



RESPON KEBIJAKAN



MANFAAT

- Industri nasional menjadi tahan dan kuat menghadapi dinamika ekonomi global sehingga industri akan bekerja efisien dengan tingkat utilisasi yang penuh dan produktivitas yang tinggi untuk menghasilkan barang-barang yang dapat bersaing dengan barang-barang impor serta mampu melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor.
- PHK dapat dicegah dan selanjutnya memperbaiki penyerapan tenaga kerja dari sektor industri.



SEKTOR PERDAGANGAN



PERMASALAHAN

- Sejak dahulu porsi peranan perdagangan kita baik volume perdagangan maupun ekspor dan impor tidak lebih dari satu persen nilai perdagangan dunia, bahkan sampai saat ini Indonesia belum banyak mensuplai jenis produk yang dikonsumsi dunia.
- Komposisi produk ekspor kita masih berkisar pada produk primer dan yang bernilai tambah rendah. Sebaliknya produk-produk yang kita impor terus berkembang baik jenis, volume maupun kecanggihan teknologinya.
- Beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor.
- Untuk ekspor terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.
- Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor
- Kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis.

- Memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan, yang selama ini ditetapkan oleh 15 kementerian/lembaga atau 18 unit penerbit perizinan.
- Deregulasi ini akan terus berlanjut sampai ke peraturan dan perizinan tingkat daerah.
- Meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan dengan adanya sistem Indonesia National Single Window (INSW) suatu pelayanan loket elektronik tunggal dalam penyelesaian proses ekspor impor, yang menerapkan prinsip single submission, single processing, dan single synchronous decision making yang juga akan berlaku dalam kegiatan ekspor impor di kawasan ASEAN.



RESPON KEBIJAKAN



MANFAAT

- Kelancaran perdagangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan deregulasi ini tentu akan memperlancar distribusi barang di seluruh Indonesia serta meningkatkan daya saing industri dan ekspor.
- Efisiensi supply chain akan menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang, dan menurunkan inflasi serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.



PEMBERDAYAAN KOPERASI & UMKM



PERMASALAHAN

- Koperasi umumnya masih terkesan rancu dalam fungsinya sebagai lembaga usaha ekonomi atau sosial
- Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan peranan koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha profesional lain justru memperkokoh kerancuan fungsi koperasi tersebut sehingga koperasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan ragam kemajuan aktivitas bisnis modern dan menyerap berbagai fasilitas untuk berkembang.
- Usaha skala mikro kecil dan menengah yang sangat lambat untuk meningkatkan skala usahanya karena berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan sebagainya.
- Koperasi dan usaha mikro kecil tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

- Pemerintah memangkas beban regulasi dan birokrasi untuk memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi, dan meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat serta menangkap peluang-peluang baru dalam kerjasama ekonomi kawasan.
- Mengeluarkan peraturan yang memperkuat kelembagaan koperasi di daerah, memperluas kepemilikan dan permodalan, pengembangan kerjasama usaha, pembiayaan syariah, serta peningkatan kapasitas dan kredibilitas.
- Mengeluarkan peraturan yang menyediakan fasilitas kemudahan impor bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan produk-produk tujuan ekspor.



RESPON KEBIJAKAN



MANFAAT

- Koperasi dan UMKM mampu berkembang secara luas di semua daerah untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat dan ekspor termasuk produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi karakter produk hasil usaha koperasi dan UMKM.
- Koperasi dan UMKM mampu bersaing dengan produk impor dan merambah pasar ASEAN.



NELAYAN



PERMASALAHAN

- Kemampuan nelayan Indonesia sudah sangat terkenal di berbagai negara, bahkan kompetensi nelayan Indonesia diakui secara de facto dalam kerjasama ASEAN, hanya saja umumnya terkendala dengan tingkat pendidikan yang membuat nelayan kita sulit mendapatkan sertifikat kompetensi.
- Kehidupan nelayan sangat memprihatinkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah baik dikarenakan kendala cuaca buruk yang panjang sebagai negara tropis maupun biaya melaut yang tinggi dibandingkan dengan hasil tangkapannya, yang sudah menjadi turun temurun dalam kehidupan nelayan.
- Pencemaran laut dan jenis perikanan yang bisa ditangkap dibawah 12 mil sebagai batas terjauh bagi nelayan kecil dan pembatasan peralatan tangkap, yang dibandingkan dengan ongkos solar yang tinggi membuat nelayan lebih memilih menjadi menyewakan kapal untuk memancing ketimbang menangkap ikan.

- Menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengkonversi minyak solar ke LPG, sehingga terjadi penghematan biaya bahan bakar sebesar 70%.



RESPON KEBIJAKAN



MANFAAT

- Apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter, maka biaya bahan bakar (Rp 6.900/liter) akan hemat sebesar Rp 144.900,- artinya dengan modal solar Rp 62.100,- dan jika nelayan mendapatkan 10 kg ikan kembung (asumsi seharga Rp 20.000,- per kilogram), maka nelayan memperoleh keuntungan sebesar Rp 137.900,- dikurangi biaya konsumsi dan umpan, paling tidak sekali melaut nelayan mendapatkan Rp 100.000,-
- Meningkatkan produksi ikan tangkap nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.



SEKTOR PARIWISATA



PERMASALAHAN

- Indonesia ibarat surga yang dicangkokkan ke bumi, karena kita memiliki berbagai daya tarik wisata yang bertujuan untuk menyenangkan mata (pemandangan), telinga (musik tradisional), hidung (aroma bunga-bunga), lidah (kuliner), dan kenyamanan lainnya (ekowisata, wisata religi, wisata bahari).
- Angka kunjungan wisata mancanegara saja kita masih di bawah Singapura yang hanya memiliki wisata belanja sebagai atraksi, Paris yang menjual fashion dan Eiffel Tower, bahkan Budapest yang hanya terkenal dengan kerajinan bordir, dan sebagainya.
- Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sungai dan laut yang luas disertai dengan pesona biodiversity, marine sport, dan shore, sands, and sun di berbagai wilayah, tetapi tidak banyak kunjungan wisata bahari, jauh dibandingkan dengan Thailand, Malaysia bahkan Singapura, apalagi wilayah great barrier reef.
- Berbagai regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata dan menarik pelancong bahari yang terkenal sebagai big spender tourist .

- Mengeluarkan peraturan-peraturan yang menambah negara bebas visa, serta menghilangkan persyaratan yang menghambat dan memperlambat kunjungan pelancong Yacht dan wisata bahari lainnya.



RESPON KEBIJAKAN



MANFAAT

- Kunjungan wisata mancanegara akan terus meningkat sehingga mencapai target 20 juta pada tahun 2019 yang berdampak langsung terhadap penerimaan devisa, industri kreatif, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Penyerapan tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung akan meningkat di sektor wisata terutama tenaga kerja instruktur diving dan snorkling, pemandu wisata, spa, kuliner, dan sebagainya.
- Selain itu usaha jasa perawatan dan penyewaan Yacht akan berkembang.